JAZIRAH
JURNAL PERADABAN DAN KEBUDAYAAN
Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Riyadul 'Ulum
e-jazirah.com
ISSN: 2716-4454

SEJARAH GERAKAN SOSIAL, POLITIK, DAN AGAMA DI KOTA TASIKMALAYA PADA TAHUN 1901-1940

Asep Achmad Hidayat[a], Usman Supendi[b], Dandie Hambaliana[c]
Drasephi62@gmail.com , usmans.bdng@gmail.com, dandiealgozali10@gmail.com ,

[abc] UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Received: 19th June 2025
Revised: 04th August 2025
Accepted: 05th August 2025
Published: 16th August 2025

Permalink/DOI

https://doi.org/10.51190/jazirah.v6i01.261

Copyright © 2025, *Jazirah: Jurnal Peradaban & Kebudayaan*.

This work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Print ISSN: 2716-4454,
Online ISSN: 2774-3144

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dinamika gerakan sosial, politik, dan keagamaan di Kota Tasikmalaya pada periode 1901 hingga 1940, suatu era penting dalam sejarah kolonial Hindia Belanda yang ditandai oleh munculnya kesadaran nasional dan resistensi terhadap dominasi kolonial. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis dengan empat tahapan utama: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi, serta didukung oleh pendekatan interdisipliner dari ilmu sosial, khususnya sosiologi dan politik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan dengan topik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan politik dan keagamaan di Tasikmalaya pada periode tersebut memainkan peran penting dalam membentuk dinamika sosial masyarakat lokal. Gerakan politik tampak melalui kehadiran Sarekat Islam dan tokoh-tokoh lokal yang memperjuangkan hak rakyat melalui jalur organisasi. Sementara itu, gerakan keagamaan mengakar kuat melalui peran pesantren dan ulama, yang tidak hanya menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga menjadi pusat perlawanan terhadap kolonialisme. Interaksi antara gerakan sosial, politik, dan agama melahirkan pola perlawanan yang khas, dengan agama sebagai fondasi ideologisnya. Temuan ini menegaskan bahwa gerakan lokal di Tasikmalaya merupakan bagian integral dari dinamika pergerakan nasional Indonesia.

KATA KUNCI
Gerakan Sosial, Hindia, Islam, Kolonialisme, Politik Lokal, Tasikmalaya

ABSTRACT

This study examines the dynamics of social, political, and religious movements in the city of Tasikmalaya during the period from 1901 to 1940—an important era in the colonial history of the Dutch East Indies, marked by the emergence of national consciousness and resistance against colonial domination. The research employs a historical approach consisting of four main stages: heuristics, criticism, interpretation, and historiography, complemented by an interdisciplinary perspective drawn from social sciences, particularly sociology and political science. Data were collected through a literature review of relevant primary and secondary sources. The findings reveal that political and religious movements in Tasikmalaya during this period played a vital role in shaping the local social dynamics. Political movements were reflected in the presence of Sarekat Islam and local figures who advocated for the people's rights through organizational means. Meanwhile, religious movements were rooted in the role of Islamic boarding schools (pesantren) and ulama, who not only propagated Islamic teachings but also served as centers of anti-colonial resistance. The interaction between social, political, and religious movements produced a unique pattern of resistance, with religion serving as its ideological foundation. These findings affirm that the local movements in Tasikmalaya were an integral part of Indonesia's broader national movement.

KEYWORDS
Social Movement, Local Politics, Islam, Colonialism, Tasikmalaya, Hindia

PENDAHULUAN

Awal abad ke-20 merupakan fase transisi penting dalam sejarah kolonial Hindia Belanda. Kebijakan Politik Etis yang mulai diterapkan Belanda sejak tahun 1901 membuka ruang bagi pendidikan dan organisasi pribumi, namun tidak menghapus dominasi struktural kolonial dalam bidang politik dan ekonomi[1]. Ketimpangan ini melahirkan dinamika perlawanan masyarakat yang beragam bentuknya, mulai dari yang bersifat kultural hingga politis. Berbagai daerah menunjukkan geliat sosial yang khas, salah satunya adalah Tasikmalaya di wilayah Priangan Timur. Kota ini memiliki posisi strategis baik secara geografis maupun kultural. Sayangnya, keterlibatan Tasikmalaya dalam sejarah pergerakan nasional masih kurang dibahas dalam kajian historiografi arus utama[2], sehingga menjadi penting untuk diangkat dalam kajian lokal berbasis data sejarah.

Tasikmalaya dikenal sebagai daerah dengan populasi muslim yang besar, pertumbuhan pesantren yang signifikan, serta iklim ekonomi rakyat yang aktif[3]. Kombinasi ini menjadikan Tasikmalaya sebagai tempat subur bagi tumbuhnya organisasi-organisasi sosial keagamaan seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan Nahdlatul Ulama. Pesantren-pesantren seperti Suryalaya (1905), Sukamanah (1927), dan Cipasung (1931) tidak hanya menjalankan peran pendidikan, tetapi juga menjadi pusat resistensi terhadap kolonialisme[4]. Aktivitas para ulama, pedagang, dan santri membentuk jaringan sosial-politik yang dinamis. Identitas lokal dan semangat religius kemudian menyatu dalam gerakan perlawanan terhadap ketidakadilan kolonial. Tasikmalaya tidak hanya menjadi penerima pengaruh nasional, melainkan juga menjadi produsen pergerakan dari akar rumput.

Meskipun demikian, hingga kini belum banyak penelitian yang secara khusus menyoroti integrasi antara gerakan sosial, politik, dan keagamaan di Tasikmalaya dalam kerangka lokal-kolonial. Beberapa studi seperti Ading Kusdiana mengenai jaringan pesantren di Priangan[5] atau Yeti Setiawati dkk. tentang Sarekat Islam di Jawa[6], masih bersifat tematik dan belum menyatukan tiga spektrum tersebut dalam satu analisis terintegrasi. Padahal, dalam konteks sejarah pergerakan nasional, dinamika lokal seperti ini penting untuk ditelaah

secara khusus. Kekosongan ini menunjukkan perlunya kontribusi baru dalam historiografi lokal yang mampu memperlihatkan pola relasi antara agama, politik, dan sosial secara menyeluruh. Melalui pendekatan interdisipliner, studi lokal ini dapat memperkuat perspektif makro sejarah nasional Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi sejarah gerakan sosial, politik, dan agama di Kota Tasikmalaya pada rentang waktu 1901 hingga 1940, serta menjelaskan pola interaksi antar-tiga dimensi tersebut dalam membentuk bentuk-bentuk perlawanan terhadap kolonialisme. Fokus utama penelitian ini adalah melihat bagaimana basis-basis keagamaan seperti pesantren dan organisasi Islam bertransformasi menjadi agen perubahan sosial-politik. Dengan pendekatan historis interdisipliner, penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana kekuatan lokal menyumbang pada narasi besar perjuangan nasional[7]. Diharapkan kajian ini dapat memperkaya pemahaman kita tentang pentingnya peran daerah dalam konstruksi sejarah pergerakan Indonesia. Maka, tulisan ini tidak hanya berbicara soal sejarah lokal, melainkan juga sejarah nasional dari perspektif pinggiran.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif historis yang bertujuan untuk merekontruksi fakta dan makna masa lalu secara deskriptif-analitis. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak melakukan eksperimen atau kuantifikasi data, tetapi fokus padda penafsiran sumber-sumber tertulis seara kritis. Proses kerja historis dalam penelitian ini mengikuti empat tahapan utama: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiograffi. Pendekatan ini diperkaya dengan sudut pandang interdisipliner, khususnya dari ilmu sosiologi dan politik, untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh tetang dinamika gerakan sosial, politik, dan agama di Tasikmalaya tahun 1901-1940.

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Pada tahap ini, penulis mengumpulkan sumber-sumbertertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber utama berasal dari buku sejarah pembentukan kota Tasikmalaya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, biografi tokoh-tokoh lokal seperti ajengan Cipasung dan Mama Kudang, serta jurnal-jurnal ilmiah yang membahas organisasi sosial keagamaan seperti Sarekat Islam,

Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, dan Paguyuban Pasundan. Sumber lainnya juga diperoleh dari arsip digital milik Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) serta koleksi perpustakaan kota Tasikmaaya.

2. Kritik Sumber

Tahap ini bertujuan mengevaluasi dan mengklasifikasi validitas serta relevansi sumber yang telah dikumpulkan. Penulis membandingkan antara sumber primer (misalnya dokumen arsip dan koran zaman kolonial) dengan sumber sekunder (seperti buku dan artikel ilmiah). Dari proses kritik ini, sumber-sumber yang paling otentik dan relevan akan dipilih sebagai fondasi utama. Kritik dilakukan untuk menghindari bias, kesalahan fakta, dan memastikan bahwa data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Interpretasi (penafsiran)

Setelah sumber diseleksi, tahap selanjutnya adalah menafsirkan data sejarah tersebut agar memiliki makna dan relevansi dalam konteks yang lebih luas. Penafsiran dilakukan dengan membaca keterkaitan antara fakta sosial, politik, dan agama secara menyeluruh. Di sinilah pendekatan interdisipliner digunakan: perspektif sosiologi membantu membaca dinamika masyarakat, sedangkan ilmu politik membantu menjelaskan bentuk perlawanan dan relasi kuasa. Tujuan interpretasi adalah menyusun narasi sejarah yang hidup, kritis, dan bermakna.

4. Historiografi

Tahap akhir adalah menyusun seluruh hasil penelitian menjadi narasi sejarah yang utuh dan sistematis. Narasi disusun secara kronologis dan tematik agar pembaca dapat memahami perkembangan gerakan sosial-politik-agama di Tasikmalaya secara runtut. Penulisan dilakukan dengan tetap mengacu pada kaidah penulisan ilmiah dan etika akademik, serta didukung kutipan-kutipan dari sumber yang sahih.

[Heuristik] →	[Kritik sumber] →	[Interpretasi] →	[Historiografi]
(Mengumpulkan)	(Mengevaluasi)	(Menafsirkan)	(Menulis Narasi)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Sosial dan Ekonomi Tasikmalaya

Tasikmalaya, yang secara etimologis berarti ”lautan bukit,” merupakan wilayah dataran tinggi yang terbentuk akibat letusan Gunung Galunggung sejak ribuan tahun lalu. Material vulkanik yang menyebar, membentuk bukit-bukit kecil setinggi 5-50 meter dan menjadikan wilayah ini memiliki lanskap geografis yang khas. Keunikan lanskap ini turut membentuk pola hidup dan kebudayaan masyarakat setempat. Aktivitas pertanian tumbuh subur berkat kesuburan tanah vulkanik, menjadikan sektor ini sebagai penopang utama ekonomi lokal[1].

Struktur sosial masyarakat Priangan, termasuk Tasikmalaya, terbagi ke dalam tiga lapisan tradisional: Menak (bangsawan dan elit birokrasi), Santana (kelas menengah), dan Somahan (rakyat biasa). Pemerintah kolonial Belanda memperkuat struktur ini dengan stratifikasi rasial: Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. Sistem ini tidak hanya berlaku dalam aspek administratif, tetapi juga dalam simbol-simbol visual seperti pakaian, tempat tinggal, dan akses pendidikan, sehingga menciptakan pemisahan sosial yang jelas[2].

Kolonialisme Belanda memanipulasi struktur sosial tersebut dengan membina elite bumiputera agar loyal pada pemerintah kolonial. Organisasi seperti Freemasonry digunakan sebagai sarana untuk membentuk ikatan budaya dan politik dengan elite lokal[1]. Akibatnya, peran Menak mengalami transformasi dari pemimpin komunitas menjadi alat kekuasaan kolonial. Situasi ini menyebabkan fragmentasi sosial dan melemahkan gerakan kolektif perlawanan[3].

Pada awal abad ke-20, Tasikmalaya tumbuh sebagai pusat industri kerajinan rakyat, terutama anyaman dan batik. Produk-produk ini awalnya hanya untuk konsumsi rumah tangga, tetapi kemudian berkembang menjadi komoditas pasar. Ekonomi kerakyatan ini tumbuh seiring meningkatnya partisipasi petani dalam memproduksi barang-barang kerajinan di luar musim tanam, membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pedesaan[4].

[1] Sejarah Freemasonry and D I Tasikmalaya, 1939, “Sejarah Freemasonry Di Tasikmalaya,1902-1939,” hlm. 1–17.

Pemerintah kolonial mendorong pertumbuhan sektor ini melalui kebijakan pendidikan vokasional dan promosi industri. Salah satunya adalah pendirian Ambachtschool (Sekolah Pertukangan) oleh J.H. Abendanon pada tahun 1901 di Tasikmalaya, sebagai upaya pelatihan tenaga kerja industri lokal. Produk-produk seperti anyaman bambu, batik, dan payung geulis menjadi identitas ekonomi lokal dan bahkan diekspor ke luar daerah, menunjukkan kemajuan signifikan dalam sektor non-pertanian.

Pertanian tetap menjadi tulang punggung masyarakat. Program kolonial seperti "teh rakyat" mendorong petani menanam komoditas ekspor seperti teh dan singkong. [2]Namun, meskipun program ini tampak memajukan ekonomi desa, pada dasarnya hanya memperluas produksi kolonial dengan menggunakan tenaga kerja pribumi tanpa mengubah ketimpangan struktural. Petani tetap bergantung pada pasar kolonial dan rentan terhadap krisis ekonomi.

Islam menjadi identitas dominan masyarakat Tasikmalaya, menjadi sumber kekuatan moral dan sosial di tengah tekanan kolonialisme dan Kristenisasi. Gerakan seperti Sarekat Islam berhasil mengkonsolidasikan massa melalui pendekatan agama sekaligus memperjuangkan keadilan ekonomi. Identitas keislaman yang kuat berfungsi sebagai fondasi budaya dan ideologis dalam melawan kolonialisme, terutama di kalangan pedagang dan petani.

Pendidikan pesantren memainkan peran penting dalam transformasi sosial. Santri dan ulama tidak hanya menjadi penyebar ilmu agama, tetapi juga pelaku dalam sektor ekonomi seperti kerajinan dan perdagangan. Interaksi antara nilai-nilai pesantren dan jaringan dagang antarwilayah menjadi jalur penyebaran gagasan dan konsolidasi sosial[3]. Perkembangan ini menjadi cikal bakal lahirnya gerakan sosial-politik yang lebih sistematis di wilayah Tasikmalaya.

[2] Syarah Nurul Fazri, 2023, "Produk Dari Priangan: Teh Rakyat Di Priangan Pada Awal Abad Ke-20" *Lembaran Sejarah*, 18, no. 2: hlm. 158, doi:10.22146/lembaran-sejarah.66991.
[3] Agus Mulyana Oka Agus Kurniawan Shavab, Leli Yulifar, Nana Supriatna, "SITUASI EKONOMI KABUPATEN SUKAPURA PADA MASA PEMERINTAHAN BUPATI RADEN ADIPATI ARIA WIRATANUNINGRAT" n.d.

B. Gerakan Sosial-Politik: Sarekat Islam, PP, NU, dan lainnya

Pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan parlemen Belanda yang menandai awal mula Politik Etis. Dalam pidatonya, ia menyatakan bahwa Belanda memiliki "utang kehormatan" terhadap Hindia Belanda karena eksploitasi panjang terhadap sumber daya dan tenaga kerja pribumi. Kebijakan ini muncul karena tekanan dari kalangan humanis dan liberal di Belanda, yang menyoroti ketidakadilan sistem kolonial. E. Douwes Dekker menjadi salah satu tokoh yang paling vokal mengkritik kolonialisme Belanda, menyuarakan keresahan pribumi lewat tulisan-tulisannya dan karya Max Havelaar karya Multatuli yang dibawa oleh pegawai kolonial muda dan memengaruhi pemikiran mereka.

Kebijakan Politik Etis membuka peluang pendidikan dan ruang publik baru, yang menjadi ladang subur bagi tumbuhnya berbagai gerakan pribumi. Salah satu yang paling awal adalah gerakan emansipasi R.A. Kartini yang memperjuangkan hak pendidikan perempuan pribumi. Menyusul kemudian Budi Utomo yang didirikan pada 20 Mei 1908, sebagai simbol kebangkitan nasional. Gerakan ini menumbuhkan kesadaran kolektif di kalangan pelajar dan elite Jawa terhadap kondisi penjajahan. Setelah itu, Sarekat Islam (SI) lahir dari latar belakang konflik perdagangan dengan Tionghoa dan berubah menjadi gerakan politik-massa terbesar di awal abad ke-20. Indische Partij menyuarakan kesetaraan warga Indo dan pribumi dalam sistem kolonial.

Kemunculan berbagai organisasi kedaerahan juga menjadi bagian dari dinamika sosial-politik Hindia Belanda. Organisasi seperti Paguyuban Pasundan (1914), Persatuan Minahasa (1927), dan Sarekat Sumatra (1927) mengusung semangat kebudayaan lokal namun tetap menyatu dalam arus nasionalisme yang lebih besar. Walaupun memiliki unsur etnosentris dan eksklusivitas, organisasi-organisasi ini menjadi ruang sosial untuk membangun kesadaran kolektif dalam menghadapi dominasi kolonial. Semangat kedaerahan yang kuat berkontribusi terhadap munculnya rasa kebangsaan yang lebih luas di kemudian hari, walaupun pada tahap awal lebih bersifat lokal dan eksklusif.

Tasikmalaya sebagai bagian dari wilayah Priangan tidak terlepas dari arus pergerakan nasional tersebut. Di wilayah ini, Sarekat Islam berkembang pesat

karena basis Islam yang kuat dan aktivitas perdagangan lokal yang dinamis. SI di Tasikmalaya tidak hanya menjadi wadah perlawanan ekonomi, tetapi juga menjadi arena untuk pendidikan politik masyarakat melalui pengajian dan diskusi keislaman. Selain SI, muncul pula organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan Paguyuban Pasundan yang turut mengartikulasikan aspirasi sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat setempat.

Para tokoh lokal dan ulama menjadi kekuatan penggerak dalam berbagai organisasi tersebut. Pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran sosial-politik masyarakat. Para santri yang dididik di pesantren membawa semangat perjuangan ke dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Pesantren tidak hanya menjadi pusat transmisi keilmuan, tetapi juga menjadi basis kekuatan sosial yang mendukung perjuangan melawan kolonialisme. Tradisi intelektual pesantren memunculkan tokoh-tokoh penting yang kelak berperan dalam gerakan nasional.

Dengan demikian, perkembangan gerakan sosial-politik di Tasikmalaya selama periode 1901–1940 tidak dapat dilepaskan dari dinamika nasional yang dipengaruhi oleh Politik Etis. Integrasi antara Islam, perdagangan, dan pendidikan modern mendorong transformasi gerakan lokal menjadi bagian dari pergerakan nasional. Tasikmalaya bukan hanya menjadi pusat aktivitas keagamaan dan ekonomi, tetapi juga menjadi ruang penting dalam membentuk identitas kolektif masyarakat yang sadar akan ketertindasan dan pentingnya perjuangan bersama melawan kolonialisme.

B. Gerakan Sosial politik Nasional (1901-1940)

Selain perkembangan industri lokal yang meningkat pada periode ini, di kota Tasikmalaya mulai tumbuh pergerakan sosial-politik sebagai bentuk perlawanan terhadap eksploitasi dan diskriminasi kolonialisme. Islam pada era tersebut mendominasi dalam langkah-langkah perjuangan rakyat, terbukti dengan berdirinya Sarekat Islam yang berhasil memobilisasi massa dengan

landasan agama dan ekonomi. Keberadaan Islam yang mengakar kuat memberikan kerangka ideologi dan sosial di kota Tasikmalaya.

organisasi seperti Sarekat Islam untuk tumbuh pesat dan menjadi kekuatan yang mengkhawatirkan bagi pemerintah Belanda. Komposisi etnis dalam organisasi elit seperti Freemasonry di Hindia Belanda pada tahun 1940 menunjukkan dominasi orang Eropa (Belanda), dengan hanya 2 orang bumiputera dan 1 orang etnis Tionghoa dari total 193 anggota di loji "De Ster in het Oosten". Ini mencerminkan segregasi sosial yang kuat bahkan di tingkat elit dan upaya Belanda untuk mempertahankan kontrol.[4]

Perkembangan Islam di Tasikmalaya tidak terlepas dalam perkembangan dunia pendidikan, terutama pendidikan pesantren yang didirikan oleh para ulama dan intelektual Islam yang berkembang dalam gerakan-gerakan keislaman dan sosial seperti Sarekat Islam (SI) dan Pasundan[5]. Oleh sebab itu, banyak sekali santri dan kiai yang ikut serta dalam menjalankan industri di Tasikmalaya. Hal ini kemudian menjadi cikal bakal munculnya gerakan-gerakan sosial, politik, dan keagamaan. Pemikiran yang dibawa oleh orang-orang Jawa ke wilayah Sunda tersebar bukan hanya melalui kajian pesantren, melainkan juga melalui tingginya komunikasi dan konektivitas dalam perdagangan.[6]

Pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina berpidato di depan parlemen Belanda. Ia menjelaskan bahwa Belanda memiliki *utang kehormatan* kepada Hindia Belanda. Semangat ini—yang dikenal sebagai semangat etis—sudah muncul ketika berbagai permasalahan kemanusiaan terjadi. Kecaman atas persoalan kemanusiaan tersebut banyak disuarakan oleh orang-orang Belanda yang berpikir humanis. Politik Etis berakar pada kepedulian terhadap masalah kemanusiaan, namun juga berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Kecaman-

[4] Freemasonry and Tasikmalaya, 1939, "Sejarah Freemasonry Di Tasikmalaya,1902-1939," *Loc.Cit.*
[5] Hasnani Siri, 2022, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, *Lakeisha*, http://repository.lppm.unila.ac.id/46359/1/SEJARAH PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA %28edit danar%29 Rev 2.pdf.
[6] Aam Amaliah Rahmat et al., 2017, "Peranan Bupati R.A.A. Wiratanuningrat Dalam Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya 1908-1937" *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 9, no. 3: hlm. 343, doi:10.30959/patanjala.v9i3.46.

kecaman atau bentuk kritik terhadap sistem pemerintahan kolonial pertama kali (kemungkinan) dilakukan oleh E. Douwes Dekker.[7]

Setelah E. Douwes Dekker melancarkan kritik keras dan bersuara lantang atas ketidakadilan yang dilakukan pihak Belanda terhadap pribumi, ia terus melakukan provokasi dengan membuka kebobrokan sistem politik Belanda yang sudah tidak relevan diterapkan di negeri jajahan. Akibatnya, muncullah gerakan-gerakan lain yang turut bersuara atas permasalahan tersebut. Di antaranya adalah para pegawai baru Belanda yang datang dengan pemikiran politik liberal. Bahkan, menurut Ricklefs, mereka membawa *Max Havelaar* di dalam koper mereka dan isi novel itu tertanam di kepala mereka.[8]

Maka tidak lama setelah itu, muncullah gerakan-gerakan pribumi meskipun tidak terlalu frontal dalam melancarkan kritik-kritik terhadap kolonial. Salah satunya adalah gerakan Budi Utomo yang lahir pada 20 Mei 1908. Menurut Sartono Kartodirjo, kelahiran gerakan Budi Utomo ini dapat dipahami sebagai hari "kebangkitan nasional." Gerakan ini menjadi sebuah penyadaran baru bagi para pelajar dan masyarakat Indonesia untuk menyadari kondisi penjajahan.[9]

Tetapi jika kita mencermati, sebelum gerakan Budi Utomo, sebenarnya sudah ada gerakan yang lebih dulu menyadarkan tentang hak-hak wanita, yaitu yang dipelopori oleh R.A. Kartini. Emansipasi sendiri merupakan keinginan yang terkandung dalam jiwa wanita pada waktu itu, yaitu keinginan untuk memperoleh persamaan hak dan kebebasan dari kurungan adat. R.A. Kartini (1879–1904), pelopor gerakan emansipasi, menyerukan agar bangsa Indonesia mendapat pendidikan, khususnya bagi perempuan.[10]

Setelah gerakan Kartini dan Budi Utomo, lahir lah gerakan yang lain yaitu Sarekat Islam. Alasan didirikannya gerakan ini karena adanya persaingan antara pedagang Tionghoa dan Jawa serta perubahan perilaku dan kesombongan para

[7] Yadi Kusmayadi, 2018, "Sejarah Perkembangan Pendidikan Di Priangan 1900-1942" *Jurnal Artefak*, 4, no. 2: hlm. 141, doi:10.25157/ja.v4i2.908.
[8] Ricklefs. M.C., 2008, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
[9] Sartonto Kartodirjo, 1997, *Sejarah Nasional Indonesia V, Loc.Cit.*
[10] Bela Wahyuni and Irhas Fansuri Mursal, 2022, "*Analisis Masa Pergerakan Nasional Indonesia 1908-1942*" *Jurnal Sejarah*, 2, no. 1: hlm. 54–67.

pedagang Tionghoa, sehingga organisasi ini dijadikan wadah perjuangan ekonomi. Terakhir, Indische Partij didirikan karena adanya keinginan untuk hidup tanpa diskriminasi sosial dari kaum penjajah.[11]. Lalu setelah berdirinya Budi Utomo sebagai pelopor pergerakan nasional, berbagai organisasi daerah pun bermunculan, mencerminkan jati diri serta perkembangan sosial dan budaya di masing-masing wilayah. Seiring berjalannya waktu, organisasi-organisasi tersebut mulai terseret oleh arus nasionalisme yang semakin kuat. Namun, umumnya mereka tetap mempertahankan eksistensi dalam organisasinya masing-masing.[12]

Menurut Suhartono, beberapa organisasi tersebut antara lain: Pasundan (1914), Moluks Politiek Verbond (1929), Persatuan Minahasa (1927), Rukun Minahasa (1912), Timors Verbond (1921), Persatuan Madura (1920), Sarekat Madura (1925), dan Sarekat Sumatra (1927). Unsur-unsur etnosentrisme dan kedaerahan pada dasarnya selalu melekat dalam organisasi-organisasi tersebut. Kedaerahan menyebabkan organisasi mengisolasi diri, sehingga sedikit pengaruh dan campur tangan dari luar yang masuk. Namun, pada saat yang sama, kedaerahan juga mampu mempersatukan anggota-anggotanya, hingga terciptalah semangat nasionalisme yang lebih luas.

C. Gerakan dan Dinamika Politik di Tasikmalaya

a. Gerakan Sosial Politik

Gerakan politik maupun gerakan sosial keagamaan di Tasikmalaya tidak dapat dilepaskan dari peran tokoh-tokoh Islam Tasikmalaya. Hal ini disebabkan karena pada tahun 1900, Tasikmalaya mengalami masa perkembangan agama dan industri perdagangan, meskipun pada tahun 1914–1918 terjadi krisis ekonomi akibat Perang Dunia I. Namun, pergerakan tersebut terus berjalan hingga berdirinya organisasi politik dan organisasi sosial keagamaan kemasyarakatan.

[11] Setiawati and Samsudin, 2020, "Gerakan Politik Sarekat Islam Di Jawa Tahun 1916-1921," *Loc.Cit.*
[12] Suhartono, 1988, *Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1942-1945)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. hlm.32.

1. Gerakan Sarekat Islam (SI)

Sarekat Islam merupakan salah satu organisasi Islam paling signifikan secara historis di Indonesia, didirikan pada akhir tahun 1911 oleh Haji Samanhudi, seorang pengusaha batik terkemuka di Kampung Lawean, Solo. Organisasi ini awalnya muncul sebagai kolektif pedagang Muslim menengah dan awalnya bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Namun, setelah keterlibatan H.O.S. Tjokroaminoto dalam kepemimpinan organisasi, nama tersebut diubah dari Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam, mencerminkan serangkaian tujuan yang lebih luas.[13]

Gagasan H.O.S. Tjokroaminoto terbukti ketika Sarekat Islam mulai berkembang ke beberapa daerah, seperti Priangan yang pusatnya berada di Bandung. Salah satu tokoh yang mengagas berdirinya SI di Priangan adalah Gunawan, diikuti oleh Abdul Moeis dan R. Wignajadisastra. Ketiga tokoh tersebut bukanlah orang sembarangan; mereka adalah tokoh pergerakan SI pertama di wilayah tersebut[14], dari tiga tokoh inilah SI mulai masuk ke daerah tasikmlaya.

Dalam perjalanannya, Sarekat Islam di Tasikmalaya mulai tumbuh dan berkembang pesat karena kehadirannya disambut oleh kalangan menengah dan para kiyai. Diperkirakan, jumlah pengikut SI pada saat itu sangat banyak, mencapai puluhan ribu. Pada tahun 1914, SI sudah memiliki pengikut yang tersebar di beberapa daerah seperti Garut, dengan perkiraan sekitar 10.000 orang. Hal serupa juga terjadi di Ciamis, Banjar, dan Tasikmalaya.[15]

Gerakan SI yang sejalan dengan pemikiran para pedagang menjadikan sebagian besar haji-haji[16] di Priangan ikut menghimpun diri dalam organisasi SI. Tentu saja mereka bergabung untuk kepentingan proteksi persaingan ekonomi.

---

[13] Tsabit Azinar Ahmad, 2014, "Sarekat Islam Dan Gerakan Kiri" *Sejarah Dan Budaya*, 8, no. 2: hlm. 1–7.
[14] Nensi Dwi Lora et al., 2023, "Menganalisis Karakter Dari Abdoel Moeis Sebagai Pahlawan Pejuang Dan Sastrawan Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia," 2, no. 2: hlm. 188–96, doi:10.22437/krinok.v2i2.26249.
[15] Yong Mun Cheong, 1973, "Conflicts Within The Prijaji World Ofe The Parahiangan i West Java 1914-1927" *Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.*
[16] Panggilan bagi orang muslim yang sudah berangkat ke mekah untuk melaksanakn ruku islam yang ke 5

Isu-isu yang menjadi tujuan SI sangat relevan dengan kepentingan mereka, yaitu: pertama, memajukan semangat dagang di kalangan bumiputera; kedua, memberikan bantuan kepada anggota perkumpulan yang tanpa kesalahan dan tanpa kesengajaan berada dalam berbagai kesulitan; ketiga, memajukan pendidikan rohani dan kepentingan materiil bumiputera serta membantu meningkatkan kedudukan bumiputera; keempat, menghilangkan salah pengertian mengenai agama Islam dan memajukan kehidupan keagamaan di kalangan bumiputera sesuai dengan hukum, tata cara, dan agama tersebut; kelima, menempuh segala cara dan menggunakan semua jalan yang diperkenankan dan tidak bertentangan dengan ketentraman umum serta adat istiadat yang baik.[17]

Kelahiran Sarekat Islam (SI) di Tasikmalaya, yang dikenal dengan sebutan Afdeeling B, diperkirakan terjadi pada tahun 1918, setelah kongres SI yang dipimpin oleh H.O.S. Tjokroaminoto di Manonjaya. Lahirnya gerakan ini dipersiapkan sebagai penyuarakan perjuangan suci (jihad) dalam melakukan perlawanan terhadap pihak Belanda.[18] Sebenarnya gerakan SI di Tasikmalaya itu berbeda dengan gerakan-gerakan yang ada didaerah lain.

Gerakan Sarekat Islam lokal Tasikmalaya memiliki ideologi atau dasar pemikiran yang dibangun atas sumber-sumber ajaran Islam tradisional. Pemahaman umum mengenai Islam ini dibawa oleh ulama tarekat yang mengajarkan ilmu hikmah dan tasawuf. Pemahaman agama ini menekankan intisari keyakinan tauhid (pengesaan Tuhan). Islam dipahami sebagai tempaan spiritual untuk mencapai derajat tertinggi dalam penghambaan kepada Tuhan melalui empat tahap dan tingkatan, yaitu syariah (hukum), tariqah (jalan atau metode), ma'rifah (pengetahuan), dan hakikat (realitas pengetahuan mistik tertinggi).

Maka, ketika gerakan perang suci (jihad) dibentuk, banyak para kiyai yang ikut bergabung, di antaranya adalah KH. Soedja'i dari Gudang Tasikmalaya. Beberapa tokoh asal Manonjaya yang terlibat dalam gerakan ini antara lain H.

[17] Setiawati and Samsudin, 2020, "Gerakan Politik Sarekat Islam Di Jawa Tahun 1916-1921," *Loc.Cit.*
[18] Sarekat Islam Lokal. Jakrta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1975.hl 97

Dahlan (pengurus ST Manonjaya), H. Oedjoe Adjhoeri (pengusaha pribumi), H. Badri, dan H. Hamaedi dari Gunungtanjung. Sementara di daerah Garut, Afdeeling B terkonsentrasi di wilayah Wanaraja, dengan pemimpin yang paling populer adalah H. Adra'i (kiai) dan H. Haromaen (kiai).

Pada akhirnya gerakan SI mengalami perpecahan perikiran pada akhir tahun 1920 atau sekitar tahun 1923 han dimana perpecahan dikalangan Si pecah dikarenakan berbeda pandnagan dalam menetukan disiplin partai, yang disebabkan juga pengaruh dai belanda, maka banyak sekali SI lokal yang berpindahan haluan ataupun yang tetap menajdi Si, ada juga yang tetap SI tapi membuka ruang bagi pemikiran soialis atau PKI.

Dan ini yang terjadi pada SI priangan dimana SI priangan ketika SI pusat mulai melemah banyak para elit SI yang membuka ruang untuk berdiskusi dengan PKI, puncaknya ialah pada tahun 14 maret 1923 terjadi kongres antara SI dan PKI yang pada akhirnya akan melahirkan Oragnasasi baru yaitu Sarekat Rakyat (SR). Sejak awal pembentukannya, Sarekat Rakyat dipersiapkan untuk meraih dukungan sekaligus mewadahi mantan aktifis Sarekat Islam (SI). Penamaan "Sarekat Rakyat" ditilai lebih bisa diterima ketimbang nama Partai Komunis Indonesia (P.K.I).

Penamaan Sarekat Rakyat ini juga mencerminkan pandangan lokal para pemimpin pergerakan yang masil loyal dengan Sarekat Islam. Anggota SR, yang umumnya mantan aktifis Sl, tidak begitu memahami ajaran ideologi komunis sebagaimana dianut oleh tokoh elit P.K.I. Tampaknya, sebagian anggota SR tetap perpegang ajaran Islam yang menjadi platform ideologi gerakan Sarekat Islam. Maka tak heran, tak sedikit dari para haji dan guru-guru agama, di Tasikmalaya dan daerah Priangan lainnya, yang terlibat dalam gerakan berhaluaan sosialis ini.

2. Pagoejoeban Pasoendan (PP)

Gerakan politik PP di tasikmlaya tidak lepas dari dua sosok tokoh yang terkenal yaitu R. Ahmad Atmadja dan R. Soetisna Sendjaja. Dalam gerakan sosial politiknya dua tokoh ini mampu memberikan kotribusinya dalam Pendidikan dan perjuangan. Pada tahun 1920 R. Ahmad Atmadja sebagai ketua Bale Pawulangan Pasundan (BPP) berhasil mendirikan sekolah dasar untuk

rakyat pribumi bernama Holland Inlandsche School (HIS) Pasoendan yang berdiri di Jalan Jajaway (sekarang bernama jalan Dewi Sartika). Pada tahun 1928, BPP mendirikan sekolah menengah pertama untuk rakyat pribumi bernama Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) Pasoendan.[19]

Tidak hanya itu R. Ahmad Atmadjaja berhasil mendirikan sekolah menengah keguruan bernama Kweekschool Pasoendan. Berselang tiga tahun (1936), BPP mendirikan Handelschool Pasoendan. Terakhir, BPP mendirikan sekolah untuk istri yang dikenal Sakola Kaoetamaan Istri Pasoendan.95 Keberhasilan R. Ahmad Atmadja dalam mengembangkan pendidikan untuk rakyat pribumi, mendorong simpati dan dukungan masyarakat Tasikmalaya.

Kedua R. Soetisna Sendjaja beliau juga merukan angota dari PP sekaligus ia juga sebagai angota dari gerakan Sosial keagaman yaitu NU, dalam gerakanya di dalam PP beliau banyak memberikan kotribusi yang besar terutama dalam bidang jurnalistik, ini dibuktikan dengan dibentuknya koran yang berbahasa sunda femomenal bertajuk Sipatahoenan. R. Soetisna Sendjaja menjadikan Sipatahoenan sebagai corong propaganda ide kemajuan dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya. Pandangan kritisnya dalam Sipatahoenan mendapat tempat di hati pembaca orang Sunda tatar Pasundan. Pada tanggal 10 februari 1939, Algemeen Handelsblad, koran Belanda terbitan Amsterdam, memberikan perhatian khusus terhadap Sipatahoenan yang tumbuh menjadi koran besar dengan oplag 5.800 eksemplar perhari.[20]

Terbitnya koran Sipatahoenan merukan ajang dari perjuangan politik PP, dengan terbitnya koran-koran ini banyak memberikan kesadaran kepada halayak orang atas kemerdekan dan memberikan kritikan-kritakan bagi pemerintahan pada saat itu, dengan terbitnya surat kabar Sipatahoenan ini menjadi bentuk corong politik Paguyuban Pasundan, sekaligus sebagai sebuah bentuk pendidikan politik bagi masyarakat saat itu mengenai kondisi perpolitikan Indonesia dan dunia. Sampai tahun 1915 Paguyuban Pasundan telah berhasil mendirikan cabang di Tasikmalaya, diikuti dengan pembukaan cabang

[19] Miftahul Falah, 2010, *Sejarah Kota Tasikmlaya 1820-1942*, Bandung: Uga tatar sunda.
[20] Tawekal No. 127,15 Juni 1938Rabiul Akhir 1357 tahun ke 3

di Bandung, Cianjur, Bogor, dan Purwakarta. Cabang-cabang di wilayah Jawa Barat tersebar di kota-kota, kabupaten, kewedanaan, kotapraja hingga kecamatan. Cabang-cabang yang paling banyak anggotanya terdapat di Priangan (terutama di Tasikmalaya), sedangkan yang paling sedikit anggotanya terdapat di Indramayu dan Banten. Sampai akhir tahun 1933, cabang Tasikmalaya beranggotakan 419.[21]

b. Gerakan Sosial Agama

1. Gerakan Nahdlatoel Ulama (NU)

Gerakan ini ketika sampai di Tasikmlaya sama seperti gerakan PP yaitu dibawa oleh dua tokoh yang intelktual, NU juga pada saat iru dibawa oleh dua tokoh kiyai yang karismatik pertama KH. A. Qulyubi dan KH. Padil pada sekitar tahun 1928.[22] Tetapi selain dua tokoh tersebut pedirinya NU di Tasikmlaya tidak terlepas dari kebijakan RAA. Wiratanoeningrat yang membentuk perkumpulan ulama untuk mendukung kebijakan-kebijakan Bupati dalam mendapatkan supremasi umat Islam Tasikmalaya.[23]

Tak hanya itu dikarenakan Tasikmlaya pada saat itu menjadi basisi pesantren yang sangat banyak, semisal Ajengan Sobandi pesantren Cilenga yang didirikan oleh Ajengan Sobandi, selanjutnya Kiai Zainal Mustafa Sukamanah dan Kiai Ruhiat Cipasung. Ajengan Sobandi sendiri sebenarnya santri Mama Gudang yang lebih kepada pergerakan politik, namun pilihan Ajengan Sobandi pada NU ini bisa dirunut dari proses belajarnya di Makkah di bawah asuhan Syaikh Mahfuzh Tremas yang menjadi guru hampir semua pendiri NU. Masa Ajengan Sobandi belajar di tanah suci diperkirakan bersamaan dengan K.H. Abdul Wahab Hasbullah, tokoh utama pendiri NU.[24]

Berdirinya NU itu berawal dari sebuah rapat KH. Fadil atau rumah KH. Dimyati di Nagarawangi. Dalam rapat ini diputuskan kepengurusan NU Cabang Tasikmalaya yaitu Rois Syuriah KH. Padil dan Ketua H. Dasuki. KH. Qulyubi

[21] Andre Bagus Irshanto, 2017, "Kiprah Politik Paguyuban Pasundan Periode 1927-1959," 17, no. 1: hlm. 76–89.
[22] Widonugrahanto A Purnama, N.H. Lubis, 2017, "The Thought of Struggle of Nadhlatul Ulama Kyai With Islam Modernist in West Java (1930-1937)" *Pantajala Journal*, 9, no. 2: hlm. 309–24.
[23] Rahmat et al., 2017, "Peranan Bupati R.A.A. Wiratanuningrat Dalam Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya 1908-1937," *Loc.Cit.*
[24] Yahya, 2021, *Ajengan Cipasung*, *Loc.Cit.*

kemudian mensosalisasikan berdirinya NU kepada para Kyai di Tasikmalaya. Dalam sosialisasi itu terdapat Kyai yang menanggapinya bahkan ikut aktif dalam kegiatan organisasi NU, Beberapa Kyai yang mendukung dan bergabung dengan NU diantaranya KH. Dahlan (Cicarulang), KH. Ruhiyat (Cipasung Singaparna), KH. Zaenal Mustofa (Sukamanah), KH. Masduki (Awipari), KH. Zabidi (Nagarakasih)[25].

Perkembangan NU semakin meluas ketika tokoh intelektual masuk yaitu R. Seotisna Senjaja, tidak lama setelah itu Pada tahun 1932 para pengurus NU Tasikmalaya mengadakan rapat di HIS Pasundan di Jajaway Jl. Pasundan. Dalam rapat tersebut diputuskan kepungurusan NU Cabang Tasikmalaya yaitu Ketua R.Sutisna Senjaya dan Sekretaris KH.O. Hoelaemi atau dikenal dengan panggilan Pak Emi. Penujukkan Pak Emi merupakan syarat yang diajukan oleh Sutisna Senjaya. Dia mau menjadi Ketua dengan syarat Pak Emi menjadi sekretaris.

NU dibawah kepemimpinan R.Sutisna Senjaya mengalami kemajuan terutama dalam bidang jurnalistik, pada saat itu NU cabang Tasikmlaya menerbitkan suatu majalah yang diberi nama AL-Mawa'idz. Majalah ini menjadi motor pergerakan NU sekaligus menyebarkan ajaran-ajaran agama dan pemikiran-pemikaran NU bagi wilyah tasikmalaya bahakan Periangan.

2. Muhammadiyah dan Persis

Gerakan Muhamadiyah di Tasikmlaya tidak terlapas dengan sosok R.Ikik Wiradikarta seorang anggota dari media pres tasikmlaya yaitu Tawekal dan Balaka, mesti pada saat itu yang menjadi ketua adalah Sutama seorang kepala sekolah Ambachshool Tasikmlaya. Ia menjadi ketua merupakan hasil perintah dari Moh. Fadjri dari oraganisasi muhamadiyah garut agar merintis organisasi di tasikmlaya.[26]

Dalam perjalannya Muhamadiyah banyak di dukung oleh para pedagang, pengusaha dan media pres, ini mengakibatkan banyaknya yang masuk kepada organisasi tersebut. Muhamdiyah juga aktif dalam kegiatan soial dengan cara

[25] Budi Sujati, 2020, "Dinamika Nahdlatul Ulama Di Tasikmalaya Tahun 1926-1961" *SINAU : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 6, no. 2: hlm. 1–18, doi:10.37842/sinau.v6i2.19.
[26] Dipusipda, 2024, *Sejarah Pembentukan Kota Tasikmalaya 1901-2024*, *Loc.Cit.*

medirikan sebuah kepanitian bernama Penoeloeng Kesengsaraan Oemoem (P.K.O). PKO aktif mengadakan aktifitas sosial pada hari-hari besar Islam. Mengadakan pembagian daging kurban untuk fakir miskin. Pada lebaran idul adha tahun 1939, PKO mengadakan pembagian daging kurban untuk fakir miskin, sunatan masal untuk yatim piatu, daan kegiatan lainnya. P.K.O. Muhammadiyah juga berhasil mendirikan roemah pijatoe yang diperuntukan untuk menampung anak-anak yatim piatu.

Adapun dengan Persatuan Islam (PERSIS) pertama kali berdiri pada tanggal 12 September 1923 di Bandung. Pendirian organ ini adalah gagasan dari seorang alumnus Dâr al-'Ulûm Mekkah bernama H. Zamzam yang sejak tahun 1910-1912 menjadi guru agama di sekolah agama Dâr al-Muta'alimîn. Dalam pendirian PERSIS, H. Zamzam dibantu H. Muhammad Yunus, saudagar sukses yang di masa mudanya memperoleh pendidikan agama secara tradisional.[27]

Muncul di Tasikmalaya pada 1935. Ketua pertamanya ustadz Usman Aminullah. Tokoh yang dekat dan belajar langsung kepada Ustadz Zamzam dan A. Hassan. PERSIS mampu membangun sebuah pesantren di Benda, sebuah kampung di bagian utara kota Tasikmalaya. Dari Pesantren ini gagasan pembaharuan PERSIS disebarkan melalui berbagai kegiatan pendidikan keagaman. PERSIS Tasikmalaya aktif melakukan propaganda pembaharuan pemikiran keagaman, sekaligus melontarkan wacana kritis seputar pemurnian ajaran Islam.

Persatuan Islam (Persis) berdiri pada tanggal 12 September 1923 di Bandung. Pendirian organ ini adalah gagasan dari seorang alumnus Dâr al-'Ulûm Mekkah bernama H. Zamzam yang sejak tahun 1910-1912 menjadi guru agama di sekolah agama Dâr al-Muta'alimîn. Dalam pendirian PERSIS, H. Zamzam dibantu H. Muhammad Yunus, saudagar sukses yang di masa mudanya memperoleh pendidikan agama secara tradisional

[27] Firnanda Titania Dzulfa Shifna Hafidhotul Mar'ah, Najwa Zakiyya Husna, 2010, "Sejarah Dan Perkembangan Persis" *Materi Kuliah Kompetensi ICT (Cyber PR)*, 4, no. 6: hlm. 1–11, http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/466/jbptunikompp-gdl-sangrajuli-23260-1-01.babi-r.pdf.

KESIMPULAN

Periode 1901 hingga 1940 menandai suatu era krusial dalam sejarah Tasikmalaya, di mana wilayah ini menjadi ajang pergulatan dan transformasi signifikan yang dipicu oleh interaksi kompleks antara gerakan sosial, politik, dan keagamaan. Analisis mendalam menunjukkan bahwa ketiga dimensi ini tidak bergerak secara independen, melainkan saling memengaruhi dan membentuk corak masyarakat Tasikmalaya pada masa tersebut. Secara sosial, periode ini menyaksikan munculnya kesadaran kolektif yang didorong oleh respons terhadap perubahan kebijakan kolonial dan tekanan ekonomi. Berbagai inisiatif sosial, seringkali berakar pada nilai-nilai keagamaan, berkembang untuk mengatasi permasalahan lokal seperti kemiskinan dan ketidakadilan. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, baik yang bersifat tradisional maupun modern, berperan vital dalam memobilisasi penduduk dan membangun solidaritas di tengah tantangan zaman.

Dalam ranah politik, dominasi kolonialisme Belanda memicu reaksi beragam dari masyarakat Tasikmalaya. Meskipun kontrol pemerintah kolonial kuat, benih-benih perlawanan dan aspirasi kemerdekaan mulai tumbuh. Gerakan-gerakan keagamaan, dengan pemimpin-pemimpin kharismatiknya, kerap menjadi motor penggerak perlawanan implisit maupun eksplisit terhadap otoritas kolonial, seringkali menyamarkan tujuan politik mereka di balik agenda keagamaan. Munculnya organisasi-organisasi politik modern, meski belum sepenuhnya matang, menunjukkan adanya pergeseran dalam strategi perjuangan, dari resistensi sporadis menuju upaya yang lebih terorganisir.

Aspek keagamaan menjadi fondasi utama yang menopang dan mengarahkan gerakan sosial serta politik di Tasikmalaya. Islam, sebagai agama mayoritas, tidak hanya menjadi pedoman spiritual, tetapi juga ideologi perlawanan dan sumber inspirasi bagi perubahan. Tokoh-tokoh ulama dan pesantren memainkan peran sentral dalam membentuk opini publik, menyebarkan gagasan anti-kolonialisme, dan memobilisasi massa. Reformasi keagamaan yang muncul pada periode ini turut berkontribusi pada penguatan identitas lokal dan membangkitkan semangat kebangsaan, yang pada gilirannya memengaruhi dinamika sosial dan politik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial, politik, dan keagamaan di Tasikmalaya antara tahun 1901 dan 1940 merupakan sebuah simfoni perjuangan yang dinamis. Tasikmalaya bukan hanya objek pasif dari kebijakan kolonial, melainkan sebuah subjek yang aktif membentuk respons dan aspirasinya sendiri, seringkali dengan memanfaatkan modal sosial dan keagamaan yang kuat. Pemahaman atas interaksi kompleks ini tidak hanya memperkaya historiografi lokal, tetapi juga memberikan lensa penting untuk memahami bagaimana masyarakat di wilayah lain merespons dan bertransformasi di bawah tekanan kolonial pada masa yang sama.

Referensi

A Purnama, N.H. Lubis, Widonugrahanto. 2017, "The Thought of Struggle of Nadhlatul Ulama Kyai With Islam Modernist in West Java (1930-1937)." *Pantajala Journal* 9, no. 2, 309–24.

Adolph, Ralph. 2016, "Peranan KH. Zainal Musthafa Dalam Mendirikan Dan Mengembangkan Pesantren Sukamanah Tahun 1927-1944" 1–23.

Ahmad, Tsabit Azinar. 2014, "Sarekat Islam Dan Gerakan Kiri." *Sejarah Dan Budaya* 8, no. 2, 1–7.

Cheong, yong Mun. 1973, "Conflicts Within The Prijaji World Ofe The Parahiangan i West Java 1914-1927." *Singapura: Institute of Southeast Asian Studies*.

dipusipda. 2024, *Sejarah Pembentukan Kota Tasikmalaya 1901-2024*, .

Falah, Miftahul. 2010, *Sejarah Kota Tasikmlaya 1820-1942*, Bandung: Uga tatar sunda.

Fazri, Syarah Nurul. 2023, "Produk Dari Priangan: Teh Rakyat Di Priangan Pada Awal Abad Ke-20." *Lembaran Sejarah* 18, no. 2, 158: doi:10.22146/lembaran-sejarah.66991.

Freemasonry, Sejarah, and D I Tasikmalaya. 1939, "Sejarah Freemasonry Di Tasikmalaya,1902-1939" 1–17.

Irshanto, Andre Bagus. 2017, "Kiprah Politik Paguyuban Pasundan Periode 1927-1959" 17, no. 1, 76–89.

Kusmayadi, Yadi. 2018, "Sejarah Perkembangan Pendidikan Di Priangan 1900-

1942." *Jurnal Artefak* 4, no. 2, 141: doi:10.25157/ja.v4i2.908.

Lestari, Fathia. 2020, "Perilaku Sehat Masyarakat Priangan Tahun 1911-1942." *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 4, no. 2, 233–46: doi:10.15575/hm.v4i2.9500.

Lora, Nensi Dwi, Budi Purnomo, Andre Mustofa Meihan, and Universitas Jambi. 2023, "Menganalisis Karakter Dari Abdoel Moeis Sebagai Pahlawan Pejuang Dan Sastrawan Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia" 2, no. 2, 188–96: doi:10.22437/krinok.v2i2.26249.

M.C., Ricklefs. 2008, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Mubarak, A. Zaki. "Mama Kudang Dan Kota Santri: Biografi Sejarah KH. Ahmad Soedja'i Dan Kota TAsikmlaya" , Pemkab Kota Tasikmlaya. n.d.: https://books.google.co.id/books?id=BwhXEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

Oka Agus Kurniawan Shavab, Leli Yulifar, Nana Supriatna, dan Agus Mulyana. "SITUASI EKONOMI KABUPATEN SUKAPURA PADA MASA PEMERINTAHAN BUPATI RADEN ADIPATI ARIA WIRATANUNINGRAT" n.d.

RAHMA, ANNISA ZANUAR. 2018, "BAB III Objek Dan Metode Penelitian." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 147, 1689–99.

Rahmat, Aam Amaliah, Nina Herlina Lubis, and Widyo Nugrahanto. 2017, "Peranan Bupati R.A.A. Wiratanuningrat Dalam Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya 1908-1937." *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 9, no. 3, 343: doi:10.30959/patanjala.v9i3.46.

Sartonto Kartodirjo, Dkk. 1997, *Sejarah Nasional Indonesia V*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-Balai Pustaka.

Setiawati, Yeti, and Samsudin Samsudin. 2020, "Gerakan Politik Sarekat Islam Di Jawa Tahun 1916-1921." *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 4, no. 2, 355–72: doi:10.15575/hm.v4i2.9502.

Shifna Hafidhotul Mar'ah, Najwa Zakiyya Husna, Firnanda Titania Dzulfa. 2010, "Sejarah Dan Perkembangan Persis." *Materi Kuliah Kompetensi ICT (Cyber PR)* 4, no. 6, 1–11: http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/466/jbptunikompp-gdl-sangrajuli-

23260-1-01.babi-r.pdf.

Siri, Hasnani. 2022, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, . *Lakeisha*: http://repository.lppm.unila.ac.id/46359/1/SEJARAH PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA %28edit danar%29 Rev 2.pdf.

Suhartono. 1988, *Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1942-1945)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sujati, Budi. 2020, "Dinamika Nahdlatul Ulama Di Tasikmalaya Tahun 1926-1961." *SINAU : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora* 6, no. 2, 1–18: doi:10.37842/sinau.v6i2.19.

Wahyuni, Bela, and Irhas Fansuri Mursal. 2022, "Analisis Masa Pergerakan Nasional Indonesia 1908-1942." *Jurnal Sejarah* 2, no. 1, 54–67.

Yahya, Iip D. 2021, *Ajengan Cipasung*, Bekasi: alif.id. Edited by Muhamad Ali Usman. Cetakan 2.